

**KAJIAN TENTANG
GELAR DAN KEKUATAN MINIMAL
SATPUR DAN SATBANPUR TNI AD DALAM RANGKA
MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI AD**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari P. Miangas sampai P. Rote dengan luas bentangan yakni 7,7 juta km², terdiri atas 17.504 pulau dipersatukan oleh laut dan samudera yang luas dengan garis pantai Indonesia sepanjang 81.000 km¹ berada pada persilangan geostrategi serta geopolitik Asia Pasifik dan rangkaian Polynesia merupakan kawasan yang sangat dinamis. Posisi ini memiliki implikasi pertahanan Negara yang kompleks dan sangat terbuka, mudah dimasuki dari berbagai arah. **Konsekuensi logis dari konstelasi geografi seperti itu**, jika dihadapkan pada trend perkembangan global berimplikasi pada proyeksi ancaman. Ancaman kedepan mengalami Transformasi akibat

¹ Buku Data Geografi Indonesia,hal 281,Wilayah Perbatasan ,PT Balai Pustaka 2007.

pesatnya kemajuan Teknologi Informasi, maka untuk mengeliminasi **dibutuhkan gelar kekuatan dari TNI AD yang memiliki multi efek dengan mewujudkan kekuatan tangkal** (Deterrence Power) yang terukur dan diperhitungkan bagi Negara disekelilingnya.

b. Namun apabila dihadapkan dengan kondisi dilapangan, bahwa TNI AD sebagai bagian integral dari TNI sesuai yang termaktub dalam pasal 8, UU RI No, 34 tahun 2004 yaitu, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan didarat, sampai saat ini **belum dapat menampilkan kekuatan tangkal**. Kondisi tersebut dapat dipastikan belum tertatanya gelar kekuatan yang diharapkan hanya karena **keterbatasan anggaran** pertahanan. Belum merata dalam mengartikan bahwa, Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur sebagai elemen utama TNI AD dalam melaksanakan tugasnya masih banyak menemui kendala. Kendala tersebut apabila dihadapkan dengan situasi perkembangan tentang kondisi perbatasan darat, **maka sangat mendesak untuk mendapat perhatian khusus².**

² Postur Pertahanan ,Corry R Bakrie,2008.

Walaupun dengan keterbatasan anggaran, TNI AD telah berhasil membentuk pos-pos pengaman perbatasan yang bersifat sementara. Pos-pos tersebut tergelar disepanjang perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan New Nugini, serta P. Timor Barat dengan Timor Leste. Kondisi yang sementara ini, tentunya sangat perlu untuk dibangun dan dikembangkan sesuai strategi pertahanan Negara, yaitu strategi pertahanan berlapis untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Dengan melakukan penyiapan pembangunan serta penataan yang strategis, maka gelar kekuatan minimal satuan tempur dan bantuan tempur TNI AD saat ini sangat perlu ditingkatkan, untuk mendukung tugas pokok TNI AD.

c. Menyikapi latar belakang tersebut diatas, maka sangat perlu diadakan kajian yang mendalam tentang gelar kekuatan minimal dengan mencermati perubahan karakteristik dari hakekat Ancaman. Pada kenyataannya gelar kekuatan TNI AD khususnya satuan-satuan tempur dan bantuan tempur saat ini belum ada di wilayah perbatasan. Dengan demikian gelar dan kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur akan menjadi prioritas dalam menata penempatan satuan di wilayah perbatasan Indonesia. Sehingga dari penataan Satpur dan Satbanpur di perbatasan akan dapat meningkatkan daya tangkal satuan terhadap kemungkinan ancaman musuh yang akan timbul.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana gelar dan kekuatan minimal Satuan Tempur dan Bantuan Tempur dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.
 - b. **Tujuan.** Kajian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan TNI AD dalam menetapkan kebijaksanaan pada gelar dan kekuatan minimal Satuan Tempur dan Bantuan Tempur yang diprioritaskan di wilayah perbatasan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.
- 3. Ruang lingkup dan tata urut.** Ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang gelar dan kekuatan minimal Satuan Tempur dan Bantuan Tempur yang dititik beratkan pada wilayah perbatasan darat Indonesia, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Kondisi Satpur dan Satbanpur TNI AD saat ini.
- d. Perkembangan Lingkungan strategis.
- e. Analisa Gelar Kekuatan minimal Satpur dan Satbanpur TNI AD.
- f. Penutup.

4. Metode dan pendekatan.

- a. **Metoda.** Kajian ini menggunakan metoda deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa semua permasalahan gelar kekuatan Satpur dan Satbanpur saat ini dan bagaimana mengembangkannya secara minimal yang dapat menampilkan kekuatan tangkal yang tepat .
- b. **Pendekatan.** Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data serta perkembangan tugas-tugas TNI kedepan pada pola OMP maupun OMSP.

5. Pengertian.

- a. **Ancaman** adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa ³.
- b. **Postur TNI AD** adalah wujud penampilan TNI AD yang merupakan keterpaduan keseluruhan dan aspek-aspek kemampuan, kekuatan dan gelar untuk dihadapkan kepada hakikat ancaman dalam pelaksanaan tugas pokok.
- c. **Gelar kekuatan** adalah sejumlah kekuatan TNI AD yang terdiri dari kekuatan tempur, kekuatan bantuan tempur, kekuatan bantuan administrasi, kekuatan intelijen, kekuatan

³ Prediksi Ancaman ,Buku Pelajaran Strategi Penangkalan NSS

kewilayahan, dan kekuatan cadangan yang digelar pada daerah operasi tertentu dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman lawan.

d. **Sistem pertahanan Negara (Sishanneg)** adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang didiami oleh lebih dari 300 suku bangsa membentuk kondisi yang sangat majemuk. Kondisi yang heterogen tersebut berimplikasi pula terhadap kategorisasi isu-isu keamanan maupun pertahanan. Karakteristik geografis Indonesia mengandung tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan Negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Tugas untuk melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik Negara kepulauan mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan Negara untuk menghasilkan daya tangkal yang handal. Guna pembahasan lebih komprehensif dan utuh maka dalam kajian ini yang melandasi dan dijadikan dasar pemikiran meliputi landasan historis, landasan filosofis, landasan operasional dan landasan teori serta dasar pemikiran yang akan mengantar pada pokok bahasan.
7. **Landasan Historis.** Selama kurang lebih dari 64 tahun pasca perang kemerdekaan, berbagai terminologi telah digunakan sebagai referensi untuk menunjukkan strategi pertahanan Negara yang diterapkan, terminologi tersebut adalah pertahanan total (1945-1949), pertahanan rakyat (1950-1959), pertahanan rakyat total, sistem pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (1950-2000) dan

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (2000-sekarang) yang kemudian dalam perjalanan sejarah telah berulang kali mengalami restrukturisasi organisasi secara periodik diantaranya beberapa organisasi yang dinyatakan “idle” direorganisasi dengan Keputusan Kasad No, Kep/18/IV/1976 tanggal 28 April 1976⁴. Kemudian pada awal tahun 1984 Panglima TNI (ABRI) menyempurnakan melalui surat Keputusan No, Kep/08/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI AD yang dilatar belakangi oleh perubahan hakekat ancaman yang dihadapi, rentang kendali organisasi, efisiensi biaya dan pembinaan personel serta performance satuan tempur, dan hal tersebut ditindak lanjuti oleh KASAD dengan melikuidasi beberapa Kodam dengan tujuan meningkatkan pembinaan dan penggunaan kekuatan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui Perintah Operasi No, 1 tanggal 22 September 1984 dan disempurnakan lagi melalui dua STR KASAD No, 430 dan No, 603 tentang penetapan jumlah Kodam dan perubahan Penomoran Kodam (Sejarah TNI AD 1974 - 2000).

8. Landasan Filosofis.

- a. **Landasan Idiil (Pancasila).** Karena wilayah pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan

⁴ Sejarah TNI AD 1974-2004,DISBINTAL TNI AD,Jakarta 2005.

kedudukan yang strategis sebagai Negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, guna mewujudkan tujuan Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian konsepsi pembentukan tata ruang wilayah pertahanan guna menyiapkan kekuatan TNI dalam rangka sistem pertahanan Negara menggunakan landasan Pancasila sebagai acuan.

b. **Landasan Konstitusional (UUD 1945).** UUD 1945 Pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan konsepsi pembentukan tata ruang wilayah pertahanan guna menyiapkan kekuatan TNI dalam rangka sistem pertahanan Negara dalam perspektif Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) tertuang dalam Pembukaan dan Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dalam sistem pemerintahan pada Negara Indonesia mempunyai daerah dan wilayah dalam wadah NKRI. Pembelaan Negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 merupakan Hak dan Kewajiban setiap warga Negara, Oleh karena itu setiap upaya untuk meningkatkan kesadaran bela Negara, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kemampuan dan kekuatan Hanneg, diarahkan untuk memiliki kemampuan dalam menjawab hakekat ancaman ke depan.

c. Landasan Konseptual.

- 1) Wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengartikan wilayah Indonesia beserta segala isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara bulat dan utuh, termasuk didalamnya kesatuan pertahanan dan keamanan.
- 2) Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan kemampuan serta kesungguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara, sehingga ketahanan nasional merupakan pangkal dan tujuan dari pembangunan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan Negaranya.

9. Landasan Operasional.

- a. **Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional.** Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup serta melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan Kompartemen Wilayah Pertahanan berdasarkan pemanfaatan bagi semua kepentingan harus diatur secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan

lingkungan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sehingga tercapai penataan Kompartemen Wilayah Pertahanan yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

b. **Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.** Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dan profesional diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah, hal ini yang harus dikoordinasikan lebih rinci oleh Komando Kewilayahan dalam membantu Pemda untuk Pengembangan dan penataan Kompartemen Wilayah Pertahanan dimasa yang akan datang dengan penyempurnaan produk-produk Komando Kewilayahan secara serasi, selaras dan terpadu dengan program pembangunan daerah.

c. **Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya

nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dipersiapkan diartikan sebagai pengelolaan pertahanan yang salah satu wujudnya menata ruang wilayah nasional beserta komponen-komponen pertahanan lainnya menjadi Kompartemen Wilayah Pertahanan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

d. Undang undang RI no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 Undang-undang TNI No. 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara maka untuk itu dibutuhkan TNI yang kuat, solid, tangguh dan profesional untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedang tugas TNI AD sebagai bagian Integral dari TNI sesuai yang termaktub dalam pasal 8 UU RI No 34 tahun 2004 adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan-kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan didarat.

10. Landasan Teori

- a. **Dewi Fortuna Anwar**, dalam bukunya “Sasaran Sishankamneg 5-10 tahun mendatang” mengatakan secara umum bahwa upaya pengembangan sistem pertahanan Negara di Indonesia harus memperhatikan tiga faktor utama, yaitu pertama faktor geostrategi (internal maupun eksternal), kedua faktor perubahan international, ketiga faktor gelar operasi militer guna memenangkan perang.
- b. **Pemikiran Robert Cooper** dalam bukunya “The breaking of Nation: Order and Chaos” in 21st century” 2004 dikatakan bahwa era paska perang dingin banyak bermunculan Negara baru yang sampai saat ini masih dalam proses konsolidasi internal dan teridentifikasi masuknya intervensi militer asing (PBB) akibat rendahnya otoritas Negara serta ketidak kemampuannya untuk menangani berbagai konflik didalam negeri dan Cooperpun menyimpulkan meningkatnya ancaman Internasional karena adanya kompetisi kekuatan militer, serta terciptanya keamanan regional dengan menolak hadirnya kekuatan dominan⁵, dominasi yang terjadi tidak lagi kekuatan bersenjata melainkan melalui jaringan politik. Hal ini sepertinya akan menjadi inspirasi yang dipilih untuk menentukan gelar dan kekuatan militer yang dibangun.

⁵ Order and Chaos in 21 st Century, 2004, Robert W Cooper, Michigan University.

- c. **Hukum Hungtinton.** Menurut Samuel Hungtinton, dengan teori clash of civilization dimana masa yang akan datang dalam abad 21 ini seperti diprediksi Hungtinton akan terjadi konflik atau perselisihan konflik-konflik dalam peradaban dunia, baik itu konflik antar budaya, antar timur barat, antar agama, etnik, konflik perbatasan antar Negara dan sebagainya.
- d. **Cara Penarikan Garis Pangkal (Baseline).** Konvensi Jenewa tentang Laut Wilayah dan Zona Tambahan memuat beberapa ketentuan baru tentang cara-cara penarikan garis pangkal (Pasal 3 dan 5 Konvensi Jenewa), yaitu garis pangkal yang biasanya dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial⁶. Konvensi Jenewa merupakan pedoman dalam menentukan garis pangkal, sehingga batas laut teritorial yang merupakan kedaulatan wilayah NKRI jelas dan perbatasan antar Negara tetangga sesuai dengan hukum Internasional. TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan di daerah perbatasan, mampu mengawasi dan mengamankan kedaulatan wilayah NKRI secara optimal.
11. **Dasar pemikiran.** Dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu yang menonjol, di antaranya adalah isu perbatasan darat yaitu meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas Negara. Aksi penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita

⁶ Tata cara penarikan Garis Batas Negara Resolusi Jenewa 1941.

dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan manusia merupakan bentuk ancaman keamanan lintas Negara yang paling menonjol pada dekade terakhir.

Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas Negara tersebut telah mempengaruhi kebijakan keamanan global dan pertahanan Negara besar yang menempatkan isu-isu tersebut sebagai isu keamanan bersama. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas Negara telah sangat merugikan kepentingan nasional sehingga merupakan suatu prioritas untuk ditangani, termasuk bekerja sama dengan sejumlah Negara sahabat. Wilayah perbatasan darat membentang sampai ribuan kilometer dan terbagi dalam tiga segmen, yakni di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta di Timor Barat yang berbatasan dengan Timor Leste. Dengan demikian hal tersebut merupakan bagian dari kepentingan pertahanan yang mendesak. Tugas yang diemban oleh satuan-satuan TNI AD yang digelar untuk mengamankan wilayah perbatasan darat adalah tugas yang penuh tantangan. Tugas tersebut membutuhkan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi serta dukungan dari semua pihak.

Perbatasan darat, karakteristik geografinya sangat sulit dijangkau dengan sarana transportasi biasa serta belum terjangkau oleh sarana komunikasi. Wilayah tersebut pada umumnya merupakan daerah yang tertinggal dari segi pembangunan sehingga

infrastruktur di wilayah tersebut sangat minim. Kondisi yang demikian memerlukan mental kejiwaan yang tangguh serta fisik yang prima untuk mengatasi alam yang keras dan jauh dari kehidupan masyarakat.

Pada saat ini penanganan keamanan di wilayah perbatasan darat telah berjalan melalui gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan dengan Malaysia, yakni di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yakni Provinsi Papua serta wilayah perbatasan dengan Timor Leste, yakni di Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gelar kekuatan TNI tersebut telah memberikan efek penangkalan yang sangat besar. Kehadiran TNI di wilayah perbatasan darat selain melaksanakan tugas pertahanan, dengan kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan di wilayah tersebut, telah ikut menggerakkan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang relatif terisolasi. Kegiatan ini selain memberikan efek penangkalan, sekaligus telah menurunkan tingkat ancaman keamanan lintas Negara yang melalui jalur darat, seperti, penyelundupan dsb. Gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan darat saat ini sangat terbatas, maka sangat perlu untuk diprioritaskan dan dikembangkan.

BAB III

KONDISI SATPUR DAN SATBANPUR TNI AD SAATINI

12. Umum. Kondisi gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur saat ini, apabila dihadapkan kepada Negara kepulauan, serta ancaman yang semakin kompleks dapat dikatagorikan masih ada peluang untuk ditata kembali. Artinya bahwa, bila dicermati gelar kekuatan Satuan Tempur maupun Satuan Banpur yang telah tergelar sampai saat ini, masih terkesan terkonsentrasi di pusat kota besar. Kondisi ini mungkin yang mendasari dari pengembangan pada jaman penjajah (Belanda) serta keterbatasannya anggaran pertahanan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa para elite politik atau pengamat militer selalu mengedepankan pembangunan pertahanan (TNI) khususnya TNI AD mengkonsentrasikan kekuatannya di kota-kota besar atau di Pulau Jawa. Hal ini apabila dipelajari secara mendalam, tentu ada benarnya. Karena apabila dicermati secara pasti bahwa di wilayah perbatasan darat maupun wilayah yang dianggap memerlukan kehadiran TNI AD, saat ini merupakan hal yang sangat mendesak untuk mendapat perhatian khusus. Oleh karenanya bagaimana kondisi Satpur dan Sat Banpur saat ini yang **tergelar di wilayah NKRI serta yang tergelar di wilayah perbatasan darat** akan diuraikan lebih lanjut.

13. Gelar Kekuatan TNI AD di wilayah perbatasan darat. Wilayah perbatasan darat Negara Indonesia mempunyai 3 wilayah daratan yaitu: Kalimantan, Papua dan Timor Barat ⁷:

a. **Wilayah Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.** Wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Pulau Kalimantan yaitu: Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak mempunyai panjang garis batas ± 966 km, dan Provinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah mempunyai panjang garis batas ± 1.038 km. Gelar kekuatan satuan yang telah siap dibawah wewenang Kodam Tanjungpura dapat dilihat kekuatannya sebagai berikut:

1) Kodam Tanjungpura, saat ini memiliki daerah tanggung jawab Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Adapun Satpur dan Satbanpur yang tergelar yaitu: 1 Brigif, 8 Yonif, 1 Yonif Raider, 2 Denkav, 2 Yon Armed, 1 Den Arhanud, 3 Denzipur dan satuan baru 2 Batalyon di perbatasan.

2) Sedangkan gelar kekuatan khususnya satuan yang melaksanakan tugas di perbatasan adalah:

a) Kalbar.

(1) Brigif-19 terdiri dari Yonif-641, Yonif-642, dan Yonif-644 (kerangka).

(2) Yonif Ter-643.

⁷ Postur TNI AD 2009 -2014.

- b) Kaltim.
 - (1) Terdiri dari Yonif-611, Yonif-613, dan Yonif-614 (kerangka).
 - (2) Yonif 600/R.

b. **Wilayah Perbatasan antara Indonesia dengan PNG.** Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini berada di Pulau Papua yaitu garis perbatasan yang memanjang dari utara ke selatan melalui sebelah timur Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya sampai ke Kabupaten Merauke⁸.

- 1) Kodam Cendrawasih, saat ini memiliki daerah tanggung jawab Provinsi Papua, Papua Barat. Adapun Satpur dan Satbanpur yang tergelar yaitu: 1 Brigif, 6 Yonif diperkuat, 1 Denkav, 1 Denzipur.
- 2) Sedangkan gelar kekuatan khususnya satuan yang melaksanakan tugas di perbatasan adalah:
 - a) Brigif -100 terdiri dari Yonif-754, Yonif-755, dan Yonif-756.
 - b) Yonif Ter-751, Yonif Ter-752, Yonif Ter-753.

c. **Wilayah Perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.** Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste berada di Timor Barat yaitu garis perbatasan yang

⁸ Postur TNI AD 2009 -2014, hal 13.

memanjang melalui distrik Maliana, Kovalima dan Oecusse membentang sepanjang kurang lebih 268,8 km yang meliputi Kabupaten Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk perbatasan Wilayah distrik Oecusse, menjadi daerah enclave (kantong) yang terjepit antara Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU⁹. Gelar kekuatan satuan yang telah siap dibawah wewenang Kodam Udayana dapat dilihat kekuatannya secara terurai:

- 1) Kodam Udayana, saat ini memiliki daerah tanggung jawab Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Satpur dan Satbanpur yang tergelar yaitu: 1 Yonif diperkuat, 1 Yonif Raiders, 2 Yonif, 1 Kikavser, 1 Denzipur.
- 2) Sedangkan gelar kekuatan khususnya satuan yang melaksanakan tugas di perbatasan adalah:
 - a) Brigif-21/Komodo terdiri dari Yonif-743, Yonif-744.
 - b) Yonif Ter-742.
 - c) Yon Raider-900/R.

14. Gelar Kekuatan TNI AD di Daerah NKRI yang tidak memiliki wilayah perbatasan darat. Gelar kekuatan TNI AD khususnya Satuan Tempur dan Satuan Banpur di daerah yang tidak memiliki wilayah perbatasan antar Negara di daratan Indonesia,

⁹ Dislokasi dan Komposisi satuan TNI AD,SOPS MABES TNI AD,2005.

adalah daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

a. Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di Pulau Sumatera terdapat 3 (tiga) Kodam antara lain:

- 1) Kodam Iskandar Muda/IM. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 6 Yonif diperkuat, 1 Yonkav, 1 Denzipur, 1 Denrudal.
- 2) Kodam I/BB. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Brigif, 8 Yonif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif diperkuat, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud, 1 Yonzipur, 1 Denzipur.
- 3) Kodam II/Srw. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 5 Yonif, 1 Yonif Raider, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Raiarhanud, 1 Yonzipur.

b Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di Pulau Jawa terdapat 4 (Empat) Kodam antara lain:

- 1) Kodam Jaya. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Brigif, 3 Yonif, 2 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Menarmed, 2 Yonarhanud, 1 Denarhanud, 1 Denzipur.
- 2) Kodam III/Slw. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 2 Yonarmed, 2 Yonarhanud, 1 Yonzipur, 1 Kikavser.

- 3) Kodam IV/Dip. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 7 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanud, 1 Yonzipur, 1 Kikavser.
- 4) Kodam V/Brw. Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanud, 1 Yonzipur, 1 Kikavser.

- c. **Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di Sulawesi yaitu, Kodam VII/Wrb.** Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Brigif, 1 Yonif diperkuat, 7 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Raiarhanud, 1 Denzipur.
- d **Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di Kepulauan Maluku yaitu, Kodam XVI/Ptm.** Mempunyai Satpur dan Banpur sebagai berikut: 1 Yonif diperkuat, 2 Yonif, 1 Denkav dan 1 Denzipur.

BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum. Salah satu faktor utama dalam membahas tentang gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur, tidak lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun kondisi dalam negeri. Esensi dari analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis tersebut akan menentukan dugaan ataupun perkiraan terhadap ancaman yang sangat mengkait dalam penyelenggaraan pertahanan Negara. Dugaan ataupun perkiraan ancaman tersebut menjadi dasar dalam kajian ini yang bersifat strategi untuk kepentingan pertahanan khususnya pertahanan darat.

16. Kecenderungan Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. **Lingkungan Strategis Global.** Kecenderungan perkembangan global akan mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Isu keamanan tersebut, antara lain, adalah terorisme maupun ancaman keamanan lintas Negara. Munculnya isu-isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, penguatan identitas primordial, bagi Negara berkembang, isu keamanan baru banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang kebanyakan masih terbelakang, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.

Isu terorisme Internasional, membawa beberapa implikasi. Diantaranya, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengancam jiwa manusia dan mengancam seluruh Negara. Selanjutnya bahwa terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan dimana aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut kesiap-siagaan yang prima. Penanganan terorisme memaksa adanya peningkatan kerjasama pertahanan menjadi lebih intensif dan progresif. Kedepan penanganan terorisme, menggunakan kekuatan militer menjadi salah satu pilihan strategi pertahanan sehingga harus ada aturan yang jelas agar tidak berbenturan dengan norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia.

Perkembangan lingkungan strategis juga diwarnai oleh isu kelangkaan energi. Kebutuhan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas¹⁰. Implikasinya berdampak terhadap perekonomian, politik, dan keamanan global. Meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber minyak dan gas merupakan kondisi yang mendorong timbulnya persaingan antar Negara dalam penguasaan sumber energi di berbagai kawasan. Dengan mengingat bahwa sumber minyak dan gas sebagian besar terdapat di Negara berkembang, terutama potensi yang berada di perbatasan darat yang belum dikelola. Sehingga kedepan Negara tersebut akan menjadi pihak yang paling banyak merasakan dampaknya. Kondisi keamanan

¹⁰ Apresiasi Ancaman Global BAIS 2008.

global diwarnai oleh meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas Negara. Aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembajakan liar, dan pencurian ikan merupakan bentuk ancaman keamanan lintas Negara yang paling menonjol.

Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas Negara tersebut telah mempengaruhi kondisi keamanan global sehingga isu-isu tersebut menjadi isu keamanan bersama yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh. Indonesia, dengan garis perbatasan darat yang sangat panjang, sangat rawan dengan ancaman keamanan lintas Negara, seperti penyelundupan narkotika dan obat terlarang (Narkoba), penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan manusia, dan pembalakan hutan secara liar yang diselundupkan melalui wilayah perbatasan. Ancaman keamanan lintas Negara tersebut telah sangat merugikan Indonesia dari segi ekonomi dan dari segi kehormatan bangsa.

b. **Lingkungan Strategis Regional.** Isu keamanan regional masih diliputi oleh konflik potensial, seperti klaim teritorial dan ketegangan militer peninggalan era tersebut. Konflik potensial tersebut dalam derajat tertentu menimbulkan krisis yang mengancam stabilitas keamanan kawasan dan Indonesia. Meskipun secara geografis terjadi jauh dari wilayah Indonesia, beberapa krisis di antaranya membawa dampak terhadap Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas Negara, dan konflik komunal serta pada skala terbatas muncul klaim teritorial sebagai akibat permasalahan perbatasan antar Negara yang tak kunjung selesai.

Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antar Negara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol, antara lain perselisihan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, kasus Cina-Taiwan, serta klaim tumpang tindih perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara. Dampak dari konflik-konflik di suatu Negara dapat menjalar ke Negara lain dan berkembang menjadi ancaman keamanan nasional. Sebagai contoh masalah Ambalat serta konflik internal yang terjadi di Timor Leste menghasilkan dampak yang menjalar ke wilayah Indonesia dalam bentuk gelombang pengungsian yang besar serta pelintas batas yang ilegal¹¹. Ancaman keamanan lintas Negara seperti penyelundupan senjata dan bahan peledak pada umumnya merupakan dampak yang dihasilkan oleh konflik antar Negara atau konflik internal di kawasan.

¹¹ Rencana Kontijensi Kotama Perbatasan 2009-20014.

c. **Lingkungan Strategis Nasional.** Dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu yang menonjol, di antaranya isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, konflik komunal yang bernuansa SARA, gerakan radikal yang anarkis, serta isu politik sebagai akibat dari reformasi yang tidak terkendali.

Isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar cukup beragam dan kompleks, di antaranya menyangkut eksistensi, status kepemilikan, konversi lingkungan, pengamanan, dan pengawasannya. Indonesia dengan beberapa Negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun laut yang hingga kini belum tuntas. Masalah perbatasan yang belum selesai menjadi sumber potensi ancaman pertahanan yang berpotensi konflik bersenjata di masa mendatang. Persoalan perbatasan yang belum tuntas tersebut di antaranya perbatasan darat dengan dan perbedaan rezim laut dengan Malaysia, batas laut dengan Singapura, penetapan batas ZEE dengan Thailand yakni di perairan selatan Laut Andaman, perbatasan laut dengan Filipina, batas ZEE dengan Palau, serta batas laut antara Indonesia Timor Leste dan Australia setelah kemerdekaan Timor Leste. Dari semua isu perbatasan, wilayah Ambalat yang diklaim oleh Malaysia serta sepuluh titik yang masih bermasalah di Kalimantan merupakan

“titik api” yang ke depan berpotensi menjadi sumber sengketa. Demikian pula, persoalan yang terkait dengan pulau terluar, seperti penggerukan pasir di Pulau Nipah dan sekitarnya, menjadi masalah serius karena terkait eksistensi pulau terluar yang makin kritis. Eksistensi pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia, yakni berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar rawan terhadap tindakan diperjualbelikan atau disewakan secara tidak sah kepada pihak lain atau warga Negara asing. Dari beberapa kasus ditemukan beberapa pulau kecil yang dikelola oleh perseorangan, bahkan ada pulau-pulau milik Indonesia yang dikelola oleh pihak asing.

Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam wibawa pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatis di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik serta gerakan separatis bersenjata. Hingga kini masih terdapat potensi gerakan separatis di beberapa wilayah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksplorasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Bangsa Indonesia menyadari dan memiliki komitmen bahwa berada dalam wadah NKRI merupakan putusan politik yang tepat dan final. Oleh karena itu, separatisme menjadi ancaman langsung terhadap keutuhan wilayah NKRI. Pengalaman Indonesia membuktikan bahwa gerakan separatisme menjadi ancaman yang menyedot anggaran Negara dalam jumlah besar. Gerakan separatisme juga menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, tidak saja mengancam keamanan dan keselamatan Negara tetapi juga terhadap keselamatan umum masyarakat dengan melakukan perampukan, pembunuhan, dan penarikan pajak secara paksa. Adanya kelompok separatis di beberapa wilayah Indonesia merupakan bibit-bibit potensi ancaman yang selalu akan mengancam keutuhan wilayah NKRI, terlebih lagi karena akar masalah separatisme banyak dipicu oleh ketimpangan pada pemberian hak politik, ekonomi, serta keadilan kepada masyarakat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat untuk berada dalam naungan NKRI akan terus menjadi potensi separatisme.

Terorisme merupakan salah satu ancaman nyata yang dihadapi Indonesia. Aksi-aksi yang dilakukan teroris telah mengancam keselamatan bangsa Indonesia serta mengancam kepentingan nasional Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Bom Bali I dan bom Bali II, pengeboman di depan

Kedutaan Australia di Jakarta, dan peledakan di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, telah menyebabkan kerugian tidak saja berupa korban manusia dan harta benda tetapi juga mengancam perekonomian dan pariwisata Indonesia. Dari aksi-aksi terorisme tersebut, terbukti bahwa Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi jaringan terorisme internasional. Pola kegiatan para pelaku aksi terorisme membuktikan bahwa jaringan terorisme internasional berusaha melakukan perekrutan anggota dari masyarakat Indonesia. Bagi Indonesia aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dari berbagai kasus terorisme juga terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional sekaligus domestik (intermestik).

Demografi Indonesia yang sangat heterogen berimplikasi terhadap potensi konflik yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Di masa lalu Indonesia pernah mengalami beberapa konflik komunal yang terjadi di beberapa wilayah, seperti yang terjadi di Kalimantan, Ambon dan Maluku Utara, serta Poso. Konflik komunal mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi sumber ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Demografi

Indonesia yang heterogen serta masyarakatnya yang memiliki masalah dari berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam hubungan kelompok atau golongan, sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi penggerak konflik komunal. Di samping itu, berkembangnya ajaran sesat di sejumlah wilayah yang mendapat penentangan keras dari masyarakat akan menjadi pendorong timbulnya konflik komunal di masa-masa datang.

Perkembangan politik sampai dengan era Reformasi banyak mengalami perubahan dan cenderung mengarah kepada ketidakpastian. Demokrasi yang berkembang seluas-luasnya belum diikuti dengan pengetahuan, kesiapan, dan kedewasaan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Nuansa kebebasan ditandai dengan terbukanya keran politik yang semakin terbuka lebar serta kontrol politik dari masyarakat yang cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, sejumlah daerah berusaha menuntut pemerintah pusat untuk memberikan status otonomi khusus. Status tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai hak untuk mengurus wilayah sendiri yang menyentuh bidang-bidang pemerintahan, hukum, agama, bahkan termasuk keamanan. Tuntutan tersebut apabila tidak dapat dikelola

secara tepat dapat berkembang menjadi potensi konflik vertikal yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Isu lain yang juga cukup menonjol adalah mengenai tata ruang wilayah. Penataan ruang wilayah yang diterapkan dalam pembagian kawasan-kawasan pembangunan mengandung potensi permasalahan yang kompleks¹². Dengan mengingat isu tata ruang terkait dengan ruang hidup dan kegiatan masyarakat serta bersifat lintas instansi, diperlukan penanganan yang seksama untuk dapat mempertemukan semua kepentingan, tanpa timbul implikasi terhadap stabilitas nasional.

Bencana alam, selain menjadi tantangan yang berskala nasional, juga memiliki dimensi lokal. Departemen dan lembaga teknis pemerintah, baik lembaga riset maupun perguruan tinggi, termasuk sumber dari luar negeri, memetakan bahwa hampir semua daerah di Indonesia rawan terhadap bencana alam dengan bentuk yang bervariasi, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kelangkaan sumber daya air, dan kebakaran hutan.

¹² Rencana Kontijensi TNI AD 2009-20014.

BAB V

ANALISA GELAR KEKUATAN MINIMAL SATPUR DAN SATBANPUR TNI AD

17. Umum. Menganalisa yang diarahkan dengan menata gelar kekuatan minimal Satuan Tempur dan Satuan Banpur merupakan salah satu langkah upaya dalam membangun pertahanan Negara Indonesia yang diselenggarakan atas dasar keyakinan pada kekuatan sendiri. Indonesia tidak mungkin dapat menyandarkan keselamatan Negara dan bangsa Indonesia kepada bangsa lain. Indonesia juga tidak berada dalam suatu pakta pertahanan dengan Negara lain. Oleh karenanya, kemampuan penangkalan Indonesia menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri di tengah dinamika lingkungan strategis. Pertahanan Indonesia dengan sistem pertahanan semesta dikembangkan dengan mengedepankan kemampuan penangkalan yang bertumpu pada kekuatan TNI sebagai Komponen Utama dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penangkalan Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan¹³. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan dan kemampuan TNI dengan Alutsista yang andal serta prajurit yang profesional untuk

¹³ Buku putih Pertahanan RI cetakan thn 2008.

melaksanakan OMP maupun OMSP. Dalam rangka itu, TNI sebagai kekuatan bersenjata dibangun dan dikembangkan dengan sistem gelar kekuatan minimal khususnya Satuan Tempur dan Satuan Banpur tergelar secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan yang mencapai standar minimal dalam penangkalan. Ukuran standar minimal dalam penangkalan adalah standar kekuatan minimum yang mampu menjaga NKRI yang dititikberatkan pada kekuatan Satuan TNI AD yang tergelar di sepanjang wilayah perbatasan antar Negara di darat, agar dapat disegani minimal pada lingkup regional.

18. Gelar Kekuatan TNI AD di wilayah perbatasan darat. Wilayah perbatasan Negara di daratan Indonesia mempunyai 3 wilayah perbatasan, yaitu Kalimantan, Papua dan Timor Barat:

- a. **Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.** Wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Malaysia berada di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak dengan panjang garis batas ± 966 km, dan Provinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah dengan panjang garis batas ± 1.038 km. Gelar kekuatan **Satuan yang melaksanakan tugas di perbatasan**, Saat ini digelar dengan sejumlah 54 Pos TNI, yang terdiri dari Brigade-19/Katulistiwa diperkuat dari unsur-unsurnya Yonif-641, Yonif-642, Yonif-644 dan Yonif Ter-643 serta Satgas Ter Rem 121/ABW, begitu juga satgas Ter Rem 091/ASN diperkuat oleh

Yonif-611, Yonif-613, dan Yonif-614 dan Tim Penerbad yang stanby di Nunukan dan Pontianak.

Dari kondisi tersebut bahwa keberadaan satuan tempur yang tergelar dalam melaksanakan tugasnya belum dapat dikatagorikan maksimal. Artinya walaupun saat ini telah dibentuk satuan tugas pengamanan perbatasan masih dibantu oleh unsur-unsur dari satuan Infanteri jajaran Brigade-19/K. sedangkan satuan Banpurnya Yonarmed 16 dan Denkav 2 dapat dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanan di daerah Kalimantan Barat. Untuk kedepan dalam rangka gelar kekuatan minimal, untuk Kalimantan Barat perlu dibentuk Kodam baru, yang memiliki Brigade pengaman perbatasan. Brigade perbatasan yang dimaksud bentukan baru untuk menambah kekuatan. Dengan demikian unsur-unsur dari Brigade tersebut membawahi 3 Batalyon. Daerah yang perlu digelar dalam pos-posnya mulai dari perbatasan Kalimantan Timur ke barat sampai dengan Lanjak. Satu Batalyon berkedudukan di Senaning, menggelar dari Lanjak ke barat sampai dengan Noyan. Sedangkan satu Batalyon baru lagi berkedudukan di Sanggau Ledo menggelar pos-posnya dari Noyan sampai dengan di Tanjung Datu. Selanjutnya Kodam tersebut memiliki satu Skudron Helly serba guna yang dapat memberikan mobilitas khusus untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Kalimantan Barat yang berkedudukan di Sungai Batu.

Selanjutnya di daerah Kalimantan Timur¹⁴. Saat ini telah dibentuk satuan yang bertugas pengamanan perbatasan, yaitu Yonif yang berlokasi di Malinau Kalimantan Timur, yang dibantu oleh unsur-unsur satuan Infanteri dari Yonif-613. Sedangkan satuan Banpurnya Raiarmed BS yang berkedudukan di Tenggarong. Denkav 1 dan Denzipur berkedudukan di Balikpapan. Denrudal di Bontang. Gelar Kekuatan saat ini apabila dihadapkan dengan penugasan pengamanan perbatasan masih terkesan belum memenuhi tuntutan. Kedudukan Satuan Banpur cukup jauh dengan perbatasan. Sedangkan Batalyon yang berada di Malinau sangat terbatas dihadapkan dengan medan yang cukup luas dan kondisi medan yang berupa pegunungan. Dengan demikian di wilayah perbatasan Kalimantan Timur gelar kekuatan minimal perlu dibentuk satu Brigade perbatasan. Brigade tersebut membawahi 3 Batalyon. 1 Batalyon yang sudah tersedia di Malinau, daerah yang perlu digelar dalam pos-posnya mulai dari perbatasan Long Berang sampai dengan Long Agung. Kemudian satu Batalyon berkedudukan di Tionghang, menggelar dari Tionghang ke Timur sampai dengan Long Agung. Sedangkan satu Batalyon baru lagi berkedudukan di Nunukan menggelar pos-posnya dari Nunukan sampai dengan di Long Berang. Selanjutnya Kodam tersebut memiliki satu Skuadron Helly serba guna yang dapat memberikan mobilitas khusus untuk melaksanakan tugas

¹⁴ PPA TNI AD thn 2000.

pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur yang berkedudukan di Nunukan. Mengingat kondisi geografi yang sangat terjal, untuk melaksanakan patroli perbatasan akan lebih memiliki mobilitas dapat ditempatkan satuan Banpur dari Peleton pasukan Kaveleri berkuda yang berkedudukan di Long Agung.

b. Wilayah Perbatasan antara Indonesia dengan PNG. Wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Papua Nugini berada di Papua. Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memanjang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan, dengan bentangan garis batas sekitar 770 km. Gelar kekuatan satuan sampai saat ini, adalah beberapa Satuan dari unsur-unsur Batalyon-756, yaitu 1 Ki di Arso, Yonif-751, 1 Ki di Skanto, Denzipur di Senggi, 1 Ki Yonif-751 di Doya Baru, 1 Ki Yonif-755 di Tanah Merah, 1 Ki Yonif-755 di Jagebob, 1 Ki Yonif-755 di Kurik, 1 Ki Yonif-755 di Sota dan Mayonif-755 yang berada di Merauke. Saat ini di gelar dengan sejumlah beberapa Pos TNI, yang diperkuat oleh 4 (empat) Batalyon infanteri yang ditugaskan sebagai Satgas pamtas yang berasal dari Kostrad maupun Batalyon penugasan yang digilir selama satu tahun satu kali. Ditugaskan pula untuk memperkuat terdapat 2 (dua) Kompi Rajawali yang besifat mobil. Kalau dicermati, bahwa dalam penugasan di perbatasan belum adanya satuan khusus yang bertugas untuk pengamanan perbatasan. Terlebih lagi

dengan menghadirkan satuan tugas yang dihadirkan dari satuan diluar organik Kodam Cendrawasih dengan mendasari sistem gelar dan kekuatan minimal, sangat perlu adanya prioritas untuk validasi DSPP Kodam yang memiliki wilayah perbatasan yaitu dengan adanya Brigade khusus pengaman perbatasan. Besaran kekuatan, tentunya disesuaikan dengan luas dan hakekat ancaman yang dihadapi. Kalau dihadapkan dengan kondisi baik geografi maupun ancaman kedepan, maka untuk Kodam Cendrawasih sangat memungkinkan untuk dibentuk 2 Brigade pengamanan perbatasan. Kedudukan Brigade pengaman perbatasan tersebut ditempatkan satu Brigade di Senggo, sedangkan satu Brigade lagi di Doya Baru. Untuk Brigade yang berada di Senggo Batalyon-755 ditambah satu Batalyon Zeni Tempur, di Jagebob, satu Batalyon Infanteri di Senggo dan satu Batalyon di Oksibil. Pelibatan satuan Kavaleri yang dapat digunakan adalah satuan Kavaleri Berkuda di Oksibil agar memiliki mobilitas yang cukup baik dihadapkan dengan kondisi medan yang berbentuk pegunungan. Untuk Brigade yang lainnya berkedudukan di Doya Baru, dengan unsur-unsurnya Batalyon-751, Denzipur 10 yang berada di Senggi ditambah satu Denzipur yang berkedudukan di Doya Baru. Bentukan baru dua Batalyon Infanteri, digelar satu Batalyon infanteri di wilayah antara Oksibil dengan Doya Baru, satu Batalyon Infanteri di wilayah antara Senggi dengan Doya Baru.

c. Wilayah Perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste berada di Timor Barat. Garis perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste dengan tiga distrik yaitu Maliana, Kovalima dan Oecusse membentang sepanjang kurang lebih 268,8 km meliputi Kabupaten Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk perbatasan Wilayah distrik Oecusse, menjadi daerah enclave (kantong) yang terjepit antara Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU. Gelar kekuatan satuan saat ini dari unsur-unsur Brigif-21/Komodo di Tamblong Kupang serta Batalyon-743 dan Batalyon-744. Adapun beberapa Pos TNI yang digelar, kecuali satuan tersebut diatas juga satuan Komando Kewilayahan dari Kodim Belu, Kodim Kefamenanu di sepanjang Kefa Maupun dari Kodim Soe, yang ditugaskan di perbatasan. Kondisi di wilayah perbatasan ini, apabila dilihat diatas peta sekilas telah tergelar satuan Infanteri, namun apabila dihadapkan dengan gelar kekuatan minimal, sesuai dengan kesepakatan khusus Kodam yang memiliki wilayah perbatasan, maka masih ada peluang untuk dibentuk satuan baru setingkat Brigade di perbatasan. Dalam penggelarannya Brigade Perbatasan tersebut berkedudukan di Atambua, dengan unsur-unsurnya Batalyon-744, Selanjutnya satu Batalyon berkedudukan di bagian timur Resikama, satu Batalyon di Welun dan satu Batalyon lainnya di Eban. Untuk satuan Bapurnya satu Denzipur di Kefamenanu

dan satu Denzipur berkedudukan di Welun. Kehadiran satuan Kavaleri yang memungkinkan adalah Batalyon Panser, yang Kompi-Kompiya tersebar di Eban, Umarese dan satu Kompi lainnya bersama Mayonkavser berkedudukan di sebelah timur Resikama.

19. Gelar Kekuatan TNI AD di Daerah NKRI yang tidak Memiliki Wilayah Perbatasan Darat. Gelar kekuatan TNI AD khususnya Satuan Tempur dan Satuan Banpur di daerah yang tidak memiliki wilayah perbatasan antar Negara di daratan Indonesia, adalah daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

a. Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur Di pulau Sumatera terdapat 3 Kodam yaitu:

- 1) Kodam Iskandar Muda. (Provinsi NAD). Satuan jajarannya terdiri dari: 6 Yonif diperkuat, 1 Yonkav, 1 Denzipur, 1 Denrudal. Bila ditinjau gelar kekuatan minimal dapat dikatagorikan sudah cukup. Namun masih perlu ditambah satu Kompi Infanteri BS berkedudukan di Pulau Simeulue. Selanjutnya yang sangat perlu mendapat perhatian adalah untuk pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.

- 2) Kodam Bukit Barisan. (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau). Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Brigif, 8 Yonif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif diperkuat, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud, 1 Yonzipur dan 1 Denzipur. Ditinjau dari gelar kekuatan minimal sudah cukup baik. Hanya yang sangat perlu mendapat perhatiannya adalah pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.
- 3) Kodam Sriwijaya. (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumsel dan Lampung). Satuan jajarannya terdiri dari: 5 Yonif, 1 Yonif Raider, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Raiarhanud dan 1 Yonzipur. Ditinjau dari gelar kekuatan minimal sudah cukup baik. Hanya yang sangat perlu mendapat perhatiannya untuk Satuan tempur di Bangka Belitung yang saat ini berkekuatan satu Kompi, perlu ditingkatkan menjadi satu Batalyon yang Kompi-Kompanya digelar satu Kompi di Tanjung Pandan Belitung, satu Kompi di Kepoh Pulau Bangka dan satu Kompi bersama Batalyonnya berada di Pangkal Pinang Pulau Belitung. Selanjutnya perlu pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.

b. Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di pulau Jawa terdapat 4 (Empat) Kodam yaitu:

- 1) Kodam Jaya. (Provinsi Jakarta Raya). Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Brigif, 3 Yonif, 2 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Menarmed, 2 Yonarhanud, 1 Denarhanud, 1 Denzipur. Yang perlu mendapat perhatian adalah untuk pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.
- 2) Kodam Siliwangi. (Provinsi Jawa Barat dan Banten). Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 2 Yonarmed, 2 Yonarhanud, 1 Yonzipur, 1 Kikavser. Hanya di perlukan pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.
- 3) Kodam Diponegoro. (Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 7 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanud, 1 Yonzipur dan 1 Kikavser. Hanya perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.
- 4) Kodam Brawijaya. (Provinsi Jawa Timur). Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanud, 1 Yonzipur dan 1 Kikavser. Untuk mengoptimalkan kekuatannya perlu

pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.

5) Secara umum untuk gelar kekuatan yang berada di pulau Jawa dihadapkan dengan gelar kekuatan minimal sudah cukup, karena bisa ditopang oleh gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur yang tergabung dalam Balahanpus (Kostrad dan Kopassus). Dengan demikian satuan tersebut perlu diarahkan pada pemenuhan personel serta alut sista sesuai dengan TOP.

c. **Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di Pulau Sulawesi terdapat 1 (Satu) Kodam.** Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Brigif, 1 Yonif diperkuat, 7 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Raiarhanud dan 1 Denzipur. Yang sangat perlu mendapat perhatian adalah pulau terdepan yang belum mempunyai Satuan tempur yaitu di Kepulauan Sanghie dan Kepulauan Talaud. Saat ini hanya aparat Kowil dari Koramil. Maka kedepan perlu dibangun satu Kompi Infanteri yang digelar di Miangas dan satu Kompi di Marore. Selanjutnya satuan tersebut perlu pemenuhan personel sesuai TOP, dan masing-masing satuan perlu perencanaan peremajaan alut sistanya.

d. **Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur di Kepulauan Maluku terdapat 1 (Satu) Kodam.** Satuan jajarannya terdiri dari: 1 Yonif diperkuat, 2 Yonif, 1 Denkav dan 1 Denzipur. Untuk gelar kekuatan di Kodam Patimura masih

terkesan terkonsentrasi di Ambon, Masohi dan Jailolo. Yang perlu mendapat perhatian adalah di pulau yang belum ada satuan tempur dan satuan banpurnya seperti di Pulau Wetar, Kepulauan Tanibar dan Kepulauan Aru. Untuk saat ini pulau tersebut hanya ada aparat Kowil dari Koramil. Sehingga kedepan perlu dibangun satu Kompi Infanteri BS di masing-masing pulau. Setelah terbentuk Satuan tersebut perlu pemenuhan personel sesuai TOP dan peremajaan alut sistanya.

e. Gelar kekuatan Satuan Tempur dan Satuan Banpur sebagai Balahanpus yaitu.

- 1) Kostrad memiliki 2 (dua) Divisi yaitu:
 - a) Divisi 1/Infanteri. Satuan jajarannya terdiri dari: 2 (dua) Brigif, 1 (satu) Brigif Linud, 6 Yonif Linud, 2 Yonif, 1 Yonif Raider, 1 Yonkavtank, 1 Kikavtai, 1 Menarmed, 3 Yonarmed, 1 Yonarhanudri, 1 Yonzipur. Gelar kekuatannya sebagian besar di Jawa Barat dan Jakarta. Sedangkan yang ada di luar Jawa Brigif Linud 3/TRIBUDHI SAKTI, berkedudukan di Ujung Pandang.
 - b) Divisi 2/Infanteri. Satuan jajarannya terdiri dari: 2 (dua) Brigif, 1 (satu) Brigif Linud, 3 Yonif Linud, 4 Yonif, 2 Yonif Raider, 1 Yonkavtank, 1 Kikavtai, 1 Menarmed, 3 Yonarmed, 1 Yonarhanudri, 1 Yonzipur. Gelar kekuatannya sebagian besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

2) Kopassus.

- a) Satuan jajarannya terdiri dari: 2 Group Parako, 6 Yon Parako, 1 Group Sandha, 3 Yon Sandha, 1 Satuan 81, 1 Yonaksus Gultor, 1 Yon Ban Gultor, 1 Dennik Gultor.
- b) Gelar kekuatannya: Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipetik makna dari gelar kekuatan minimal Satuan Tempur dan Satuan Banpur dalam rangka untuk mendukung tugas pokok TNI AD, disamping diarahkan pada penataan wilayah perbatasan darat Indonesia, juga perlu adanya pengembangan satuan yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya di wilayah yang saat ini belum disiapkannya Satuan tempur maupun Satuan Banpur sebagai berikut:

- a. **Penataan gelar kekuatan di wilayah perbatasan.**
 - 1) Perbatasan Kalimantan Barat.
 - a) Pembentukan Kodam Baru.
 - b) Pembentukan Satu Brigade Pengaman Perbatasan. Merupakan bentukan baru diluar yang sudah ada sekarang untuk menambah kekuatan di wilayah perbatasan.

- c) Unsur-unsur dari Brigade tersebut membawahi 3 Batalyon, daerah yang perlu digelar dalam pos-posnya mulai dari perbatasan Kalimantan Timur ke barat sampai dengan Lanjak. Kemudian satu Batalyon berkedudukan di Senaning, menggelar dari Lanjak ke barat sampai dengan Noyan. Sedangkan satu Batalyon baru lagi berkedudukan di Sanggau Ledo menggelar pos-posnya dari Noyan sampai dengan di Tanjung.
- d) Pembentukan satu Skudron Helly serba guna yang dapat memberikan mobilitas khusus untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Kalimantan Barat yang berkedudukan di Sungai Batu.

2) Perbatasan Kalimantan Timur.

- a) Pembentukan Satu Brigade Pengaman Perbatasan. Satuan tersebut merupakan bentukan baru untuk menambah kekuatan dengan Batalyon yang berada di Malinau.
- b) Unsur-unsur Brigade tersebut terdiri dari 1 (satu) Batalyon yang sudah tersedia di Malinau, daerah yang perlu digelar dalam pos-posnya mulai dari perbatasan Long Berang sampai dengan Long Agung. Kemudian satu Batalyon baru, berkedudukan di Tionghang, menggelar dari Tionghang ke Timur sampai dengan Long Agung. Sedangkan satu Batalyon baru lagi berkedudukan di

Nunukan menggelar pos-posnya dari Nunukan sampai dengan di Long Berang.

- c) Pembentukan satu Skuadron Helly serba guna, untuk memberikan mobilitas khusus satuan pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur yang berkedudukan di Nunukan.
 - d) Pembentukan satu Peleton Kavaleri Berkuda. Untuk melaksanakan patroli yang berkedudukan di Long Agung.
- 3) Perbatasan Papua Timur. Perlu dilaksanakan pembentukan 2 (dua) Brigade khusus pengaman perbatasan yang tempatnya antara lain:
- a) Satu Brigade berkedudukan di Senggo. Unsur-unsurnya adalah:
 - (1) Batalyon 755 ditambah satu Batalyon Zeni Tempur, di Jagebob.
 - (2) Pembentukan satu Batalyon Infanteri di Senggo
 - (3) Pembentukan satu Batalyon di Oksibil.
 - (4) Pelibatan satuan Kavaleri yang dapat digunakan adalah satuan Kavaleri Berkuda di Oksibil agar memiliki mobilitas yang cukup baik dihadapkan dengan kondisi medan yang berbentuk pegunungan.

- b) Satu Brigade lagi berkedudukan di Doya Baru. Unsur-unsurnya antara lain:
 - (1) Batalyon 751, Denzipur 10 yang berada di Senggi.
 - (2) Pembentukan satu Denzipur yang berkedudukan di Doya Baru.
 - (3) Pembentukan dua Batalyon Infanteri, digelar satu Batalyon infanteri di wilayah antara Oksibil dengan Doya Baru, satu Batalyon Infanteri di wilayah antara Senggi dengan Doya Baru.
- 4) Perbatasan Timor Leste.
 - a) Pembentukan Brigade Perbatasan berkedudukan di Atambua, dengan unsur-unsurnya Batalyon 744.
 - b) Pembentukan 3 Batalyon baru di gelar, satu Batalyon di bagian timur Resikama, satu Batalyon berkedudukan di Welun dan satu Batalyon lainnya di Eban.
 - c) Untuk satuan Denzipur dibentuk satu Denzipur di Kefamenanu dan satu Denzipur berkedudukan di Welun.
 - d) Satuan Kavaleri yang memungkinkan adalah Batalyon Panser, yang Kompi-Kompanya di Eban satu Kompi Panser, satu Kompi Panser berada Umarese dan satu Kompi lainnya bersama dengan Mayonkavsernya berkedudukan di sebelah timur Resikama.

20. Perkiraan Tahapan Penataan Gelar Kekuatan.

Penataan gelar kekuatan minimal Satuan Tempur dan Banpur tidak lepas dari disinkronkannya dengan program penataan gelar dan pembangunan kekuatan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Postur TNI AD (2000-2014)¹⁵. Tentunya dalam pelaksanaannya akan bermuara dari besaran anggaran yang dialokasikan khususnya kepada TNI AD. Bila anggaran dapat mendukung, gelar kekuatan minimal tersebut diharapkan menjadi prioritas, karena hal tersebut merupakan kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pertahanan darat. Adapun pentahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

a. **Tahap - I (Tahun 2010-2014).**

- 1) Menyiapkan Pangkalan. Membangun pangkalan serta Pos-pos perbatasan yang sudah ada.
- 2) Penataan gelar kekuatan yang diprioritaskan untuk mengisi daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- 3) Pengisian personel, yang diambilkan dari personel satuan Tempur maupun Banpur yang telah operasional, yang secara simultan untuk melengkapi TOP di satuan yang personelnya diambil untuk penugasan di perbatasan.
- 4) Pengadaan alut sista untuk melengkapi satuan baru di perbatasan.

¹⁵ Renstra TNI AD 2009-20014.

b. Tahap - II (Tahun 2015-2019).

- 1) Menyiapkan Pangkalan. Membangun pangkalan serta Pos-pos perbatasan yang sudah ada.
- 2) Penataan gelar kekuatan yang diprioritaskan untuk mengisi daerah perbatasan Papua Timur.
- 3) Pengisian personel, yang diambilkan dari personel satuan Tempur maupun Banpur yang telah operasional, yang secara simultan untuk melengkapi TOP di satuan yang personelnya diambil untuk penugasan di perbatasan.
- 4) Pengadaan alut sista untuk melengkapi satuan baru di perbatasan.

c. Tahap - III (Tahun 2020-2024).

- 1) Menyiapkan Pangkalan. Membangun pangkalan serta Pos-pos perbatasan yang sudah ada.
- 2) Penataan gelar kekuatan yang diprioritaskan untuk mengisi daerah perbatasan Timor Barat yang berbatasan dengan Timor Leste.
- 3) Pengisian personel, yang diambilkan dari personel satuan Tempur maupun Banpur yang telah operasional, yang secara simultan untuk melengkapi TOP di satuan yang personelnya diambil untuk penugasan di perbatasan.
- 4) Pengadaan alut sista untuk melengkapi satuan baru di perbatasan.

BAB VI

P E N U T U P

21. Kesimpulan.

- a. Gelar kekuatan minimal Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur TNI AD lebih diarahkan kepada kebutuhan pertahanan darat yang mendesak, dihadapkan dengan dinamika ancaman yang akan berkembang, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.
- b. Dalam penyiapan kekuatan satuan tempur dan bantuan tempur TNI AD perlu diambil langkah-langkah agar dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan yaitu melalui pembentukan dan pengembangan satuan, validasi, likuidasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi maupun dengan revitalisasi sehingga terwujudnya suatu organisasi TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern dalam rangka mewujudkan pertahanan yang kuat dan handal.
- c. Guna mewujudkan keberhasilan di dalam pembinaan organisasi dan penggunaan kekuatan TNI AD, dapat di implementasikan melalui penataan organisasi TNI AD yang didukung oleh pembinaan struktur, personel, materil, pangkalan, piranti lunak dan anggaran yang memadai, dimana antara pembinaan organisasi dan penggunaan kekuatan TNI AD

sangat dipengaruhi oleh adanya suatu upaya penataan organisasi TNI AD yang erat kaitannya dengan postur TNI AD.

d. Perkiraan tahapan untuk penyelenggaraan gelar kekuatan minimal Satuan Tempur dan Satuan Banpur, melalui 3 (tiga tahapan). Masing-masing tahapan dengan prioritas kebutuhan mendesak, dimulai penataan di Kalimantan Barat dan Kalimanta Timur, tahap berikutnya penataan di wilayah perbatasan Papua Timur, selanjutnya Timor Barat yang berbatasan dengan Timor Leste.

22. Rekomendasi.

- a. Perlu adanya langkah sinkronisasi antara TNI selaku penentu kebijakan didalam penyiapan gelar kekuatan satuan tempur dan bantuan tempur TNI AD, agar tidak terjadi kegamangan dalam pelaksanaannya.
- b. Strategi dalam pembangunan kekuatan dan penataan gelar satuan tempur dan satuan bantuan tempur mengikuti prinsip **“Prajurit yang Dipersenjatai”** bukan **“Senjata yang di awaki”¹⁶**, sehingga acuan penggelaran dan pengembangan kekuatan mendekati perhitungan yang berdasarkan perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk dihadapkan pada kemungkinan ancaman.

¹⁶ Buku putih Pertahanan RI cetakan 2008.

- c. Konsepsi pembangunan kekuatan dan penataan gelar sebaiknya berdasarkan kajian terpadu, dengan landasan akademis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan dampak sosial didaerah sasaran pembangunan kekuatan dan penataan gelar.
- d. Kajian akademis seyogyanya dilaksanakan secara komprehensif dan holistik antar lembaga Departemen maupun lembaga non Departemen agar mendapat Persetujuan Politik yang memiliki Konsistensi.
- e. Program pembangunan kekuatan dan penataan gelar satuan tempur dan satuan bantuan tempur dapat dipublikasikan secara terbatas dan memiliki akuntabilitas publik.

Bandung, Maret 2009
Komandan Seskoad

Bambang Suranto, S.Sos
Mayor Jenderal TNI